

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Komunitas ASEAN**

Cita-cita untuk membentuk suatu Komunitas ASEAN pertama kali dicetuskan oleh para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) informal ke-2 di Kuala Lumpur 1997, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020 (*ASEAN Vision 2020*). Berdasarkan kesepakatan tersebut, ASEAN diarahkan untuk menjadi, suatu kesatuan komunitas yang berpandangan maju ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli.<sup>1</sup>

Selanjutnya komitmen untuk membentuk Komunitas ASEAN dipertegas dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang dituangkan dalam *The Declaration Of ASEAN Concord II*, dimana disebutkan bahwa “ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, dan sejahtera paa tahun 2020.” Target waktu 2020 tersebut kemudian dipercepat menjadi 2015 dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina tahun 2007, dan dituangkan dalam *Cebu Declaration on the Accelaration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*.<sup>2</sup> Piagam ASEAN 2007 juga menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk menciptakan komunitas ASEAN.

Pembentukan Komunitas ASEAN bertujuan untuk lebih mempererat integrasi ASEAN tidak hanya dalam menghadapi globalisasi ekonomi, tetapi juga dalam menghadapi perkembangan konstelasi sosial dan politik internasional. Efektivitas kerjasama ASEAN dengan demikian perlu ditingkatkan, tidak lagi hanya terfokus pada kerjasama ekonomi, tetapi perlu juga diimbangi dengan kerjasama-kerjasama di bidang keamanan dan sosial budaya. Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut, maka Komunitas ASEAN didasari 3 pilar, yaitu *ASEAN Security Community* (Komunitas Keamanan ASEAN), *ASEAN Economic Community* (Komunitas

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 37

Ekonomi ASEAN), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (Komunitas Sosial-Budaya ASEAN). Adapun Tiga Pilar Komunitas ASEAN adalah sebagai berikut:

#### 1. Komunitas Keamanan ASEAN

Pada saat ASEAN didirikan, para pendiri ASEAN sepakat untuk menjalin kerjasama untuk komprehensif di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Namun dalam perkembangannya ASEAN lebih memfokuskan kerjasama di bidang ekonomi, sedangkan kerjasama di bidang keamanan masih belum dioptimalkan. Beberapa kendala yang dihadapi ASEAN dalam mengoptimalkan kerjasama di bidang keamanan adalah adanya perbedaan pandangan terhadap ancaman, serta penerapan secara kaku prinsip *non-interference* dan prinsip *sovereign equality* oleh negara anggota ASEAN. Perubahan konstelasi politik dan keamanan dunia telah menyadarkan ASEAN untuk menjalin kerjasama di bidang keamanan yang lebih integratif. Pembentukan Komunitas ASEAN sebagai pilar pertama dari komunitas ASEAN merupakan kemajuan yang signifikan dalam perkembangan kerjasama ASEAN di bidang keamanan.

Komunitas Keamanan ASEAN bertujuan untuk memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Terwujudnya perdamaian dan stabilitas kawasan merupakan modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya komunitas ASEAN. Sedangkan penyelesaian konflik secara damai akan dilakukan, antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah-masalah politik dan keamanan kawasan, seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah non-tradisional, seperti kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup, dan lain-lain. Dalam hal ini negara-negara anggota diharapkan tidak menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang berdampak pada stabilitas kawasan dengan perlindungan pada prinsip *non-interference*.

Sebagaimana telah ditentukan dalam *the Vientiane Action Programme*, pencapaian Komunitas Keamanan ASEAN diwujudkan melalui sejumlah komponen yang terdiri dari: *Political development, Shaping and sharing of norms, Conflict*

*prevention, Conflict resolution, Post-conflict peace building*. Perumusan piagam ASEAN 2007 merupakan salah satu implementasi dari komponen *shaping and sharing of norms*.

## 2. Komunitas Ekonomi ASEAN

Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi telah dimulai sejak pendirian ASEAN di Bangkok tahun 1967. Dalam deklarasi Bangkok disebutkan, tujuan ASEAN antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Kerjasama ekonomi disepakati sebagai sarana utama untuk mengembangkan suatu solidaritas regional.<sup>3</sup> Realisasi dari tujuan tersebut pertama kali digagas dalam KTT ASEAN pertama di Bali tahun 1976 menghasilkan *the Declaration Of ASEAN Concord*, yang menekankan pentingnya kerjasama di sektor perdagangan dalam upaya mendorong pembangunan dan pertumbuhan produksi baru. Negara-negara anggota pada saat itu menyepakati untuk membentuk skema kerjasama ekonomi dalam bentuk *ASEAN Industrial Project (AIP)*, dan *ASEAN Preferential Trading Arrangement (PTA)*. Penandatanganan PTA dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1977. Inilah komitmen ASEAN yang pertama untuk meliberasasi perdagangan.<sup>4</sup>

Perkembangan yang sangat signifikan dalam kerjasama ekonomi ASEAN terjadi dalam KTT ASEAN ke-4 di Singapura tahun 1992, ketika para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area* atau AFTA) yang ditargetkan akan terbentuk dalam kurun waktu 15 tahun. Pada awalnya AFTA direncanakan untuk diluncurkan pada tanggal 1 Januari 1993. Namun pada saat itu beberapa negara anggota belum siap, sehingga AFTA baru diluncurkan pada tanggal 1 Januari 1994.

---

<sup>3</sup> Seosastro, Hadi. 2007. “*Dari Perdagangan Bebas Menjadi Pasar ASEAN*” CSIS, Jakarta, 2007, hal.2.

<sup>4</sup> Mayerfas, 2007. “*Manfaat Kerjasama Ekonomi ASEAN Bagi Indonesia*” peper dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, dipresentasikan di Universitas Bung Hatta Pasang, tanggal 30 Mei 2007, hal. 10-11.

Dalam rangka pembentukan AFTA, para pemimpin negara ASEAN menyetujui *Agreement on the Common Effective Preferential Tariffs Scheme* 1992 (Skema CEPT). Skema tersebut dicapai melalui:

- a. Pengurangan dan penghapusan tarif intra-regional menjadi 0-5% dalam kurun waktu 15 tahun
- b. Penghapusan *quantitative restrictions* dan *non-tarif barriers/measures* (NTBs/NTMs)
- c. Fasilitas perdagangan, terutama di bidang kepabeanan dan standardisasi.

Target waktu 15 tahun pembentukan AFTA kemudian disepakati dipercepat menjadi 10 tahun dalam Konferensi Menteri-menteri Ekonomi ASEAN ke-26 tahun 1994. Tidak berhenti sampai di situ, dalam KTT ASEAN ke-6 di Hanoi tahun 1998, para pemimpin ASEAN menyetujui untuk mempercepat realisasi AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002.

Pembentukan AFTA merupakan komitmen ASEAN untuk meliberalisasi perdagangan intra ASEAN, namun hanya terbatas pada penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan barang. Sedangkan untuk meliberalisasi perdagangan jasa, ASEAN menyetujui *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada tahun 1995. Perundingan untuk membuka pasar-pasar jasa, ASEAN dimulai tahun 1996. Dengan adanya AFAS, pembentukan pasar-pasar jasa intra ASEAN diharapkan akan lebih luas dan lebih cepat dari yang dilakukannya dalam kerangka *General Agreement on Trade in Services* (GATS) di *World Trade Organization* (WTO).

Di samping AFTA dan AFAS, ASEAN juga menyetujui *Framework Agreement on ASEAN Area* (AIA) dalam konferensi Menteri-menteri ekonomi di ASEAN di Manila tahun 1998. Dengan AIA, ASEAN diharapkan menjadi suatu kawasan investasi yang kompetitif, terbuka, dan liberal melalui suatu persetujuan yang mengikat mengenai penerangan dan penghapusan peraturan yang menghambat arus investasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mayerfas, *op cit*, hal. 27-29.

Tahapan yang paling signifikan dalam perkembangan kerjasama ekonomi ASEAN adalah kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN bukanlah sekedar kelanjutan logis dari AFTA, AFAS, dan AIA, karena ia secara tegas diarahkan pada pembentukan pasar tunggal ASEAN. Yang dimaksud dengan pasar tunggal ASEAN di sini adalah kawasan ASEAN yang tanpa perbatasan wilayah di dalamnya, di mana perpindahan orang serta peredaran barang, jasa, dan modal di dalam kawasan tersebut dijamin kebebasannya. Sebagaimana ditegaskan dalam *Bali Concord II*, arah dari pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN adalah integrasi ekonomi ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN diharapkan akan menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi yang setara serta dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2020. Komunitas Ekonomi ASEAN akan menjadikan ASEAN sebagai sesuatu pasar tunggal dan basis produksi, mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan, menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi, serta membuat ASEAN menjadi lebih dinamis dan menjadi segmen yang lebih kuat sebagai bagian dari rantai pasok (*global supply chain*).<sup>6</sup>

### 3. Komunitas Sosial-Budaya ASEAN

Pembentukan Komunitas-Sosial ASEAN adalah sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Visi ASEAN 2020 yang mencita-citakan suatu Asia Tenggara yang terikat bersama-sama dalam kemitraan sebagai sebuah komunitas masyarakat yang saling peduli (*a communities of caring societies*). Pilar ketiga dari Komunitas ASEAN ini bertujuan bukan hanya untuk membentuk suatu komunitas dari masyarakat yang peduli, tetapi juga untuk mempercepat kerjasama dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dari kelompok masyarakat yang kurang diuntungkan dan masyarakat pedesaan. Komunitas Sosial-Budaya ASEAN juga harus

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *op cit*, hal. 142-143.

mencari keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat, khususnya wanita, pemuda, dan masyarakat lokal.

Dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu tahun 2007, para pemimpin ASEAN memberi perhatian khusus pada Komunitas Sosial-Budaya ASEAN, yang dituangkan dalam *Cebu Declaration On Caring and Sharing Community*. Dalam kesepakatan tersebut secara jelas dipaparkan langkah dan capaian yang harus dilakukan pada masa mendatang, yaitu membangun identitas regional yang lebih kuat: melaksanakan *ASEAN Strategic Framework For Social, Welfare and Family (2007-2010)*: membuat instrumen guna melindungi hak-hak pekerja migran: mempercepat implementasi *ASEAN Framework on Rural Development and Poverty Education (2006-2010)*: memberikan perhatian terhadap pembangunan masalah lingkungan dan penanggulangan bahaya penyakit menular.

Menurut Kao Kim Hourn, terdapat setidaknya lima prinsip tidak tertulis dalam mekanisme ASEAN yaitu:

- 1) Berpegang kepada peraturan-peraturan dasar yang tercantum dalam berbagai traktat, deklarasi, dan Komite ASEAN
- 2) Prinsip menahan diri (*self restrain*) dan mendorong negara anggota lain yang bersengketa untuk menurunkan ketegangan dengan mengutamakan kestabilan kawasan
- 3) Prinsip musyawarah dan mufakat
- 4) Mediasi dalam pihak ketiga dalam manajemen konflik
- 5) Menyepakati ketidaksepakatan dengan menunda agenda yang gagal disepakati sehingga situasi untuk mendiskusikannya kembali memungkinkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Chandrawati, N. 2006. *ASEAN Regional forum dan Kontribusinya terhadap. Ketahanan Nasional Indonesia d bidang Perahanan dan Keamanan . Periode 1994-2006.*

#### 4.2 AIPR dan Konflik-Konflik di Asia Tenggara

Adapun mandat dan fungsi AIPR adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi lembaga ASEAN untuk kegiatan penelitian tentang konflik, manajemen konflik dan resolusi konflik.
- 2) Mempromosikan kegiatan yang disepakati dalam *ASEAN Political-Security Community* (APSC).

Berikut ini adalah fungsi AIPR sebagai berikut:

- 1) Riset
  - a. Melakukan penelitian, menyusun berbagai kegiatan ASEAN dalam praktik perdamaian, manajemen konflik dan resolusi konflik serta pembangunan perdamaian pasca-konflik, dengan tujuan untuk menyediakan rekomendasi yang sesuai atas permintaan negara-negara anggota ASEAN.
  - b. Melakukan studi untuk mempromosikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan perdamaian, proses perdamaian dan resolusi konflik.
  - c. Mempelajari dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan mekanisme regional untuk penyelesaian sengketa secara pasif.
- 2) Meningkatkan kapasitas
  - a. Mengadakan seminar tentang perdamaian, manajemen konflik dan resolusi konflik.
  - b. Mengadakan pelatihan dalam mempromosikan suara moderasi untuk berkontribusi pada gerakan global kaum moderat serta untuk memajukan pekerjaan di bidang lintas agama.
  - c. Membangun pengetahuan intelektual di antara pejabat pemerintah terkait dalam manajemen resolusi konflik.

- 3) Kumpulan para ahli sebagai dukungan kepada badan-badan ASEAN.
  - a. Mengembangkan para ahli sebagai narasumber untuk membantu dalam pengelolaan konflik dan kegiatan resolusi konflik.
  - b. Sesuai dengan permintaan pemerintah ASEAN yaitu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait promosi perdamaian dan rekonsiliasi berdasarkan studi ASEAN serta sebagai fasilitas untuk negosiasi dalam perdamaian.
- 4) Jaringan
  - a. Berfungsi sebagai pusat pengetahuan yaitu membangun jaringan dengan lembaga atau organisasi, dimulai dari tingkat daerah ke tingkat internasional yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempromosikan bahwa perdamaian adalah bagian dari kebudayaan.
  - b. Berkolaborasi dengan badan-badan PBB terkait, organisasi regional dan sebagai wadah pemikir internasional untuk bertukar pengalaman tentang perdamaian, manajemen konflik dan resolusi konflik.
- 5) Menyebarkan Informasi
  - a. Membagikan pelajaran yang dapat dipetik dan informasi yang relevan.
  - b. Menjangkau keterlibatan masyarakat sipil untuk mempromosikan perdamaian, manajemen konflik dan pembangunan perdamaian.
  - c. Mempromosikan fungsi AIPR sebagai institusi perdamaian kepada masyarakat umum.<sup>8</sup>

Struktur AIPR sebagai berikut:

- 1) Dewan Pengurus (*Governing Council*) adalah badan pembuat keputusan tertinggi.

---

<sup>8</sup> ASEAN-IPR Information Paper – As Of 16 July 2018 1 Information Paper Asean Institute For Peace And Reconciliation (ASEAN-IPR).  
<https://asean.org/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATION-PAPER-on-ASEAN-IPR-as-of-16-Jul-2018.pdf> Diakses 09 November 2021

Dewan Pengurus (*Governing Council*) adalah badan pembuat keputusan tertinggi. AIPR terdiri dari masing-masing anggota, *ASEAN Member State* (AMS) yang bertanggung jawab untuk menunjuk pemerintah, bersama dengan Sekertaris Jenderal ASEAN dan Direktur Eksekutif. Dewan berfungsi untuk membuat perumusan pedoman dan prosedur kegiatan, pendanaan dan anggaran lembaga Sesuai dengan prosedur ASEAN, Dewan Pengurus harus mengadakan pertemuan setidaknya dua kali setahun. Selanjutnya Dewan bekerja sesuai dengan *Term of Reference* (TOR) ASEAN.

2) Dewan Penasehat (*Advisory Board*)

Dewan Penasehat bertanggung jawab untuk memberi nasehat kepada Dewan Pengurus mengenai prioritas penelitian Institut. Dewan Penasehat terdiri dari perwakilan negara anggota, *ASEAN Member State* (AMS), terdiri dari orang-orang yang terkemuka di bidang perdamaian dan rekonsiliasi. Sedangkan Direktur Eksekutif AIPR juga merupakan anggota dari mantan dari anggota Dewan Penasehat.

3) Direktur Eksekutif (*Executive Direktur*)

Direktur Eksekutif AIPR bertanggungjawab untuk mewakili Institut dalam semua urusan administrasi dan operasional dan mengelola kegiatan Institut. Direktur Eksekutif merupakan kepala Sekretariat AIPR, yang bertanggungjawab di bagian operasional sehari-hari Sekretariat.

Direktur Eksekutif bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus dan bertanggungjawab untuk membuat laporan berkala tentang kerja AIPR kepada pejabat senior terkait dengan dewan *ASEAN Political-Security Community* (APSC). Sedangkan Direktur Eksekutif pertama AIPR adalah Duta Besar Rezlan Ishar Jenie yang dilantik 17 October 2017.

Program AIPR sebelum adanya penunjukan Direktur Eksekutif, kegiatan tersebut didorong oleh Dewan Penasihat, diantaranya bekerja sama dengan mitra pemangku kepentingan terkait yaitu:

**1. Simposium AIPR tentang “Penguatan Konergensi untuk Aksi Kemanusiaan di ASEAN” pada 2-3 Oktober 2017, di Manila, Filipina.**

ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (Institut ASEAN untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi/AIPR), bersama dengan Kantor Penasihat President Filipina untuk Proses Perdamaian (OPAPP) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), mengadakan sebuah symposium bertajuk “Memperkuat Konvergensi untuk Aksi Kemanusiaan: Simposium AIPR tentang Hukum Humaniter Internasional” pada 2-3 Oktober 2017 di Manila, Filipina. Kegiatan tersebut didukung pula oleh pemerintah Norwegia dan Swiss. Simposium mengumpulkan anggota dewan AIPR beserta Dewan Penasihatnya, para Duta Besar dari negara anggota ASEAN, ASANAPOL, LSM, badan-badan PBB, organisasi internasional, think-tank, universitas, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan perwakilan dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Para peserta mendalami konvergensi hukum humaniter internasional, prinsip kemanusiaan, norma agama serta praktik budaya ddalam rangka menjawab tantangan terkait kemanusiaan dan perlindungan di ASEAN.

Simposium AIPR Secara keseluruhan sangat menginspirasi dengan merasakan semangat dari keluarga ASEAN dan tekad untuk bergerak maju sambil menghormati asas konsensus dan tanpa campur tangan. ICRC senang dapat menyaksikan peluncuran secara resmi AIPR serta diumumkannya Duta Besar Rezlan Jenie dari Indonesia sebagai direktur eksekutif pertamanya. Lembaga baru ini tentu saja akan memainkan peran kunci dalam menghadapi tantangan kemanusiaan dan

mempromosikan budaya pencegahan di kawasan untuk mencapai rekonsiliasi saat dibutuhkan, dan menjaga perdamaian. Senator Richard Gordon, ketua Palang Merah Filipina, juga memberi kami pesan inspiratif mengenai pentingnya mematuhi prinsip kemanusiaan dalam intervensi kemanusiaan apapun. Senator Gordon juga berbicara tentang peran kunci yang dimainkan oleh Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah selama krisis yang mendesak dan kompleks, dan secara keseluruhan, mengenai pentingnya diplomasi kemanusiaan dengan instansi terkait, termasuk dengan berbagai komponen pemerintah dan jaringan kemanusiaan untuk mengatasi penyebab krisis kemanusiaan secara tepat waktu.

Praktik terbaik dan rekomendasi yang diperoleh selama acara ini akan dijadikan referensi untuk refleksi yang lebih lanjut dan bertindak bersama untuk mengatasi tantangan kemanusiaan dan perlindungan di dalam dan luar wilayah, dan untuk lebih membangun budaya mencegah yang dapat memberi inspirasi bagi kawasan lainnya. Acara ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan adanya peluang-peluang baru untuk membahas isu-isu penting namun masih sensitif terkait kebutuhan perlindungan di ASEAN. Dialog kemanusiaan yang positif di tingkat kawasan akan melengkapi dialog bilateral ICRC di 80 negara di seluruh dunia. Di luar seringnya berita kebencian, kekerasan dan konflik di dunia saat ini, simposium ini mengumpulkan rohaniwan, akademisi, pekerja kemanusiaan, para penegak hukum, pejabat ASEAN, diplomat, akademisi, penyedia layanan kesehatan, pendidik dan kelompok masyarakat sipil lainnya, yang semuanya bertekad untuk tidak terbebani oleh kompleks dan brutalnya konflik dan perang, namun untuk mengangkat

martabat manusia dan penyediaan bantuan kemanusiaan untuk setiap kehidupan manusia, terutama kelompok yang rentan.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> ICRC Blog, <https://blogs.icrc.org/indonesia/memperkuat-konvergensi-untuk-aksi-kemanusiaan-di-asia-tenggara/>. Diakses 27 Februari 2022



<https://www.google.com/search?q=ICRC+Blog,+https://blogs.icrc.org/indonesia/memperkuat-konvergensi-untuk-aksi-kemanusiaan-di-asia-tenggara>

## **2. Simposium AIPR Tentang “Dampak Ekstremisme Kekerasan Menuju Moderat 27-28 November 2015, Di Yogyakarta, Indonesia**

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan simposium bertajuk Dampak Negatif Ekstremisme dengan Kekerasan terhadap Kaum Moderat (*Repercussion of Violent Extremism towards Moderates*). Penyelenggaraan simposium ini juga sebagai pengejawantahan fungsi ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), suatu institut penelitian dalam bidang perdamaian dan rekonsiliasi konflik di ASEAN yang dibentuk pada tahun 2012 dan berpusat di Jakarta yang merupakan prakarsa Indonesia. Berbagai media

telah memberitakan meningkatnya Islamophobia, hate crime, dan sentimen anti-pengungsi pasca serangan Gedung World Trade Center di New York tahun 2001 dan serangan Paris yang baru saja terjadi pada bulan November 2015. Perlunya memberdayakan kaum moderat yang mendukung perdamaian dan mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis dan radikal menjadi salah satu dasar pemikiran diselenggarakannya simposium ini.

Pada simposium dimaksud, sejumlah pakar dan pemerhati dalam bidang kajian mengenai ekstremisme, radikalisme dan terorisme dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Belanda dan Swedia, beserta beberapa tokoh pimpinan cendekiawan muslim telah membahas topik-topik terkait seperti mengenai akar permasalahan kekerasan radikal; dampak negatif kekerasan tersebut terhadap kaum moderat; peran yang perlu dikembangkan oleh gerakan moderat global; peran berbagai pemangku kepentingan seperti LSM, akademisi dan media; dan upaya penyusunan kebijakan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam penanganan dampak negatif tersebut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Prof. Bilveer Singh dan Dr. Jolene Jerard dari Rajaratnam School of International Studies Singapura, Prof. Azyumardi Azra, Prof. Din Syamsuddin, Prof Tamrin Amal Tomagola (Universitas Indonesia), Dr. Samsu Rizal Panggabean (Universitas Gadjah Mada), Nasihin Hasan (Sekretaris Wantimpres), Dr. Jan Henningsson (Senior Advisor Kemlu Swedia), Dr. Lia van Broekhoven (*Executive Director of Human Security Collective*, Belanda), Asrul Daniel Ahmad (Global Movement of Moderates Foundation, Malaysia), Duta Besar Rezlan Ishar Jenie, serta Jamil Maidan Flores (*The Jakarta Globe*).

Dalam pembukaan simposium, I Gusti Agung Wesaka Puja, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN–Kemenlu RI menggarisbawahi pentingnya mengetahui akar masalah munculnya ekstremisme, radikalisme dan terorisme, serta perlunya menerapkan *soft power*, seperti dialog antar dan intra agama dalam mengatasi perbedaan budaya dan kepercayaan, serta mempromosikan perdamaian dan toleransi. Pada waktu dua hari simposium, para pakar berbagi pengetahuan dan hasil penelitian yang telah mereka lakukan dalam mengidentifikasi akar masalah terjadinya berbagai fenomena kekerasan radikal yang merebak akhir-akhir ini. Individu yang termajinalkan, kekecewaan politik dan sejarah, ketidakadilan sosial merupakan sebagian dari banyak akar masalah yang diidentifikasi para pakar tersebut.

Kaum moderat global yang merupakan mayoritas diharapkan dapat mulai mengambil tindakan aktif untuk menanggapi gerakan radikal. Pendidikan yang baik dan pengembangan sikap toleransi dalam semua sisi kehidupan, termasuk melakukan dialog intra-faith, merupakan awal untuk melawan gerakan ini. Di samping itu, pengembangan upaya yang melibatkan kerja sama semua pihak termasuk pemerintah, kelompok masyarakat sipil, akademisi, pemuka agama, dan media juga perlu dilakukan. Penyelenggaraan simposium ini bekerja sama dengan Pemerintah Belanda dan Swedia melalui dukungan kedutaannya masing-masing di Jakarta. Simposium dihadiri para anggota Governing Council dan Advisory Board AIPR, ASEAN Committee of Permanent Representatives (CPR), Sekretariat ASEAN, pejabat pemerintah, akademisi, think-tanks dan LSM.



**3. Simposium AIPR tentang perdamaian dan Rekonsiliasi dilaksanakan pada 7-8 April 2014, di Manila, Filipina.**

Tujuan Simposium AIPR tentang perdamaian dan Rekonsiliasi yaitu antara lain sebagai berikut :

- a) memperkenalkan organisasi dan kerja AIPR kepada konstituennya;
- b) mempelajari situasi perdamaian dan konflik di kawasan ASEAN/Asia-Pasifik dan bagian lain dunia dan menganalisis inisiatif resolusi dan rekonsiliasi;
- c) berfungsi sebagai tempat untuk jaringan yang lebih kuat di antara anggota;
- d) bertukar pikiran tentang bidang penelitian yang paling relevan dan metode rekonsiliasi terbaik; dan

- e) membantu membingkai dorongan yang berkembang dan membingkai struktur organisasi yang paling sesuai.

Pembicara terkenal dari seluruh dunia, termasuk anggota Panel Perdamaian Filipina dalam pembicaraan dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) berbagi pandangan ahli mereka yang diambil dari keterlibatan panjang dan nyata dalam proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi di kawasan ASEAN. Upacara Pembukaan, yang dipandu oleh lagu dari Departemen Luar Negeri Chorale yang menyanyikan *Let there be Peace on Earth*, dibawakan oleh Penasihat Presiden Filipina untuk Proses Perdamaian, Sekretaris Teresita Quintos-Deles, arsitek utama CAB, sedangkan Departemen Luar Negeri kemudian Wakil Sekretaris Kebijakan Hon. Evan P. Garcia dan Wakil Tetap Persatuan Myanmar untuk ASEAN H.E. Min Lwin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus ASEAN-IPR menyampaikan sambutan dan pesannya masing-masing. Simposium dibagi menjadi empat sesi, yaitu:

- a) Gambaran Umum Upaya Perdamaian dan Rekonsiliasi Utama di Kawasan Asia-Pasifik: Upaya dan Inisiatif Peace Institutes and Think Tanks;
- b) Kesepakatan Proses Perdamaian Pemerintah Republik Filipina (GRP)-*Front* Pembebasan Islam Moro (MILF): Peta Jalan untuk Mindanao yang Bersatu, Progresif dan Damai;
- c) Upaya Perdamaian, Rekonsiliasi, Mediasi: Mekanisme dan Praktik Terbaik Mediasi Ketiga Negara/Internasional, Negosiasi Bilateral/Regional, Jalur Dua Diplomasi, Diplomasi Preventif, serta Mediasi dan Monitoring CSO; dan

d) Usulan untuk Mekanisme Mediasi dan Pencegahan Konflik yang Diperkuat atau Baru: Pendekatan Berbasis Aturan untuk Penyelesaian dan Pengelolaan Sengketa Antar Negara.<sup>10</sup>

**4. Simposium AIPR tentang “ Dampak Ekstremisme Kekerasan Menuju Moderat 27-28 November 2015, di Yokyakarta, Indonesia.**

Kolektif Keamanan Manusia dalam panel untuk mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan keterlibatan aktif antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk kelompok moderat, media, dan masyarakat umum, untuk membantu mempromosikan toleransi.

**5. Simposium AIPR tentang “Penderiaan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik”. 7-9 Desember 2015, di Tagaytay City, Filipina.**

Sekretaris Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Filipina Corazon J. Soliman dalam Simposium, menekankan perlunya bekerja sama untuk merumuskan kerangka kerja responsif bagi perdamaian yang pada akhirnya didukung oleh kebijakan dan program yang akan dipatuhi oleh setiap Negara Anggota ASEAN. Wanita dan anak-anak adalah yang paling rentan dan paling terpengaruh ketika pertempuran meletus. Tetapi mereka tidak boleh dipandang sebagai sektor yang lemah, karena memang tidak demikian. Anak-anak dan perempuan adalah alat yang paling potensial bagi bangsa-bangsa dalam pembangunan perdamaian, penciptaan perdamaian, dan pemeliharaan perdamaian. Kami memiliki kesempatan untuk

---

<sup>10</sup>Symposium on Peace and Reconciliation, Processes and Initiatives, <https://asean-aipr.org/symposium-on-peace-and-reconciliation-processes-and-initiatives-april-2014/>. Diakses 28 Februari 2022

mengkonsolidasikan semua praktik terbaik dan kemungkinan peluang yang dapat kami manfaatkan untuk mencapai bagian yang sulit dipahami dalam pembangunan yaitu perdamaian, Sekretaris Soliman menekankan. Duta Besar Buensuceso, yang merupakan Perwakilan Tetap Filipina untuk ASEAN, menggemakan seruan Sekretaris Solimans, menyarankan agar rekomendasi utama konferensi diteruskan ke berbagai mekanisme ASEAN dan untuk kemungkinan dimasukkan dalam program kerja dan rencana aksi mereka. Para peserta juga mendesak ASEAN untuk mendukung pengembangan langkah-langkah pencegahan konflik, seperti pemajuan budaya damai dan promosi moderasi di kawasan. Mereka mengatakan bahwa ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan dan inisiatif di bidang pendidikan, budaya, hak asasi manusia, dan politik-keamanan, antara lain, di bawah berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.

**Simposium AIPR tentang “Penderiaan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik”** membahas hal-hal berikut:

1. Memunculkan situasi perempuan dan anak dalam situasi konflik, mengungkap berbagai cara mereka dieksploitasi dalam kondisi seperti itu;
2. melihat secara dekat perekrutan anak-anak dan perempuan oleh para ekstremis agama sebagai teroris masa depan dan perusak stabilitas masyarakat;
3. menggali peran perempuan dan anak-anak sebagai *peacebuilder* dan *peacekeepers*;

4. mendiskusikan inisiatif dan mekanisme domestik dan regional yang ada, serta berbagi praktik dan model terbaik, untuk membantu melindungi dan mempromosikan kesejahteraan perempuan dan anak dalam situasi konflik;
5. merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul dari eksploitasi perempuan dan anak dalam situasi konflik.<sup>11</sup>



### 4.3 Konflik di Asia Tenggara

Sejak didirikan ASEAN, negara-negara Asia Tenggara didera konflik baik antar negara-negara anggotanya maupun dengan negara di luar anggota. Menurut Naureen Nazar dalam tulisannya yang berjudul “*Chronology of Conflict and Cooperation in Southeast Asia Post-Cold War Era*” konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara mayoritas dilatarbelakangi oleh motif politik, walaupun terdapat beberapa konflik yang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi maupun sosial. Berikut adalah mengenai kronologi beberapa Konflik Asia Tenggara:

<sup>11</sup> Asean Institut For Peace And Concilitation, <https://asean-aipr.org/symposium-on-the-plight-of-women-and-children-in-conflict-situations-dec-2015/>. Diakses 28 Februari 2021.

Adapun macam-macam konflik yang terjadi di Asia Tenggara adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

**Tabel 1. Konflik-konflik di Asia Tenggara**

Tahun	Negara	Keterangan	Hasil
1928	Indonesia-Filipina	Sengketa perairan laut antara P. Miangas (Indonesia) dengan Pantai Mindanao (Filipina)	Sengketa berkepanjangan terjadi, klaim tersebut diusung ke Mahkamah Internasional
1967	Indonesia-Malaysia	Sengketa wilayah: pulau Sipadan dan Lingitan	Sengketa selesai dan dimenangkan oleh Pihak Malaysia atas keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002
1970	Thailand	Gerakan Separatisme di Thailand oleh pemerintah tidak demokratis: diskriminasi	Konflik selesai dengan damai: melibatkan kedua kepentingan kedua kaum kawasan pada tahun 1980.

<sup>12</sup> Utari Haryati, 2017. "Contoh sengketa yang diselesaikan Mahkamah Internasional." <http://idcribd.com/dokument/349043356/contoh-sengketa-yang-diselesaikan-Mahkamah-Internasional> Diakses pada 10 November 2021

		masyarakat Pattani yang notabene Melayu-Islam	
1970-2010	ASEAN-China	Sengketa Laut China Selatan	Konflik diselesaikan secara damai: negara-negara ASEAN dan China menggagas Deklarasi berperilaku di Laut China Selatan ( <i>Declaration on Conduct of the Parties/DoC</i> ) pada tahun 2002. 17 tahun kemudian China dan ASEAN meningkatkan deklarasi <i>Code of Conduct (CoC)</i> sebagai pedoman negara yang disepakati.
2008	Kamboja-Thailand	Sengketa perbatasan Candi Preah Vihear	Sengketa tersebut selesai secara damai: Dewan Keamanan PBB memberikan amanah kepada ASEAN untuk menyelesaikan konflik tersebut.

1979-1980	Vietnam-Kamboja	Perang saudara perebutan kekuasaan antara pasukan Lon Nol dan Rezim Khmer Merah	Penyelesaian melalui intervensi pihak asing hal tersebut dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting (JIM), perjanjian Paris, dan diakhiri oleh UNTAC PBB.
1980	Malaysia-Singapura	Sengketa pulau Batu Puteh di Selat Johor	Penyelesaian sengketa secara damai melalui Hukum jalur Mahkamah Internasional di mana Pada tahun 2008 Mahkamah Internasional memutuskan putusan kedaulatan jatuh ke tangan Singapura.
2012-2013	Indonesia-Timor Leste	Klaim wilayah Indonesia yaitu perbatasan antara Kabupaten Timur Tengah Utara (RI) dengan Timor Leste	Sengketa berkepanjangan terjadi, hingga kini belum diselesaikan dan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

2013	Malaysia-Filipina	Konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah Malaysia dengan Loyalis Sultan Sulu (Filipina)	Konflik belum selesai: kedua belah pihak melakukan negosiasi, mengadakan pertemuan secara bilateral namun tidak membuahkan hasil.
2017-2019	Konflik Etnis Rohingya di Myanmar	Konflik yang melibatkan dua etnis yakni etnis Rohingya dan Rakhine.	Konflik selesai: ASEAN menyelesaikan konflik tersebut dengan menggunakan negosiasi.

Dinamika keamanan kawasan tidak bisa dilepaskan dari perubahan konstelasi sistem internasional pasca Perang Dingin. Prespektif keamanan tradisional yang lebih menekankan pada keamanan negara dan penggunaan kapabilitas militer perlahan setelah bergeser ke arah keamanan yang lebih luas yang dimotori oleh *The Copenhagen School* meliputi aspek-aspek keamanan non tradisional seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Apa yang menjadi adagium keamanan yang lazim diungkapkan dengan “*security agains us*” menjadi “*security with us*” di mana hal ini dimaknai sebagai suatu keniscayaan bahwa urusan keamanan bukan lagi menjadi domain satu negara atau dua negara saja tetapi adanya interpedensi keamanan telah menjadi urusan keamanan menjadi tanggungjawab bersama dalam negara-negara di kawasan. Implementasi ini dapat dilihat pada pola-pola aliansi yang menjadi karakteristik utama dinamika keamanan kawasan pada masa Perang Dingin perlahan telah berubah kearah interdependensi keamanan yang kemudian lebih banyak diwarnai pembangunan *security community* di beberapa kawasan. Secara tidak langsung perubahan ini juga menjadi faktor penyebab semakin berkembangnya skema-skema

keamanan regional, khususnya untuk menjawab tantangan penciptaan kondisi yang damai dan relatif stabil di level regional.

Di kawasan Asia Tenggara telah melakukan upaya-upaya untuk membangun suatu komunitas keamanan bersama terciptanya kawasan yang stabil dan damai yang diinisiasi oleh ASEAN. ASEAN sendiri sebagai salah satu wadah bertemunya negara-negara di kawasan Asia Tenggara sangat memahami potensi kawasan Asia Tenggara yang secara geografis dan politis sangat strategis sebagai suatu simpul pertemuan kekuatan-kekuatan besar yang rentan terhadap gejolak dan konflik, bahkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri pada masa itu memiliki serangkaian kebijakan yang khusus diarahkan ke kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu *sphere of influence*-nya.<sup>13</sup>

---

10 F. Andrea, 1996 *Peran Keamanan ASEAN Regional Forum, dalam Bantarto Bandoro, Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*. CSIS :Jakarta.